

REFORMASI INDUSTRI PERUNGGANAN MENUJU KETAHANAN PANGAN (PROTEIN HEWANI) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI JAWA TIMUR

Reforming Poultry Industry to Sustain Food Security (in Animal Protein) for Poor People In East Java

Paridjata Westra

*Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga Kampus C
Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115*

ABSTRACT

The number of poor people in East – Java around 7.138 millions (18.93% of total population of the province) and most of them live in rural areas. Average protein consumption of Indonesian people is only 81.9 g per day and it is much less than the minimum standard declared by WNPNG, i.e., 150 g per day. Fulfillment of animal protein for human diet is absolutely important to ensure better growth and development of the people. Data indicated that poultry industries in Indonesia including breeding and feed manufacturing are dominated by only several large companies that control production as well as local market of poultry production. However, the need for raw material particularly maize and soybean to supply the feed manufactures must be imported while local production grain is inadequate to meet the manufacturers' requirement. Data on poultry population and production in East – Java in 2007 was among other provinces in Indonesia. Food Security Act (UU No. 7/1996) does not guarantee each person to have an access to safe, nutritious and culturally appropriate food in sufficient quantity and quality to sustain a healthy life. The act promotes food security only. Thus, food sovereignty is increasingly important as an alternative framework to the concept of food security. Therefore, it is necessary to reform poultry industries with new programs based on new government regulations and the basic human right on food. It is a constitutional mandate to guarantee primary sector development to ensure that each person including poor farmers get free from hunger and they could consume animal protein adequately. Objective of the paper is to describe how to reform poultry industry through sustaining food security for rural poor people.

Key words: *reforming poultry industry, animal protein, basic human right, Food Security Act, food sovereignty*

ABSTRAK

Jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur mencapai 7,138 juta orang (18,93% dari populasi Jawa Timur) dan mereka umumnya tinggal di desa-desa. Rata-rata konsumsi protein orang Indonesia hanya 81,9 gr per hari dan nilai ini jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WNPNG sebanyak 150 gr per hari. Pemenuhan kebutuhan protein hewani bersifat mutlak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia yang lebih baik. Data menunjukkan industri perunggan di Indonesia, meliputi pengembangbiakan dan pengolahan pakan ternak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar

saja yang sekaligus mengendalikan produksi dan pemasaran di dalam negeri. Di sisi lain kebutuhan bahan baku khususnya jagung dan kedelai untuk kebutuhan industri perunggasan masih diimpor, sementara produksi biji-bijian di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Data populasi dan produksi perunggasan di Jawa Timur tahun 2007 adalah tertinggi dibanding provinsi lainnya. Undang-undang Keamanan Pangan (UU No. 7/1996), tidak menjamin setiap orang memiliki akses terhadap pangan atau nutrisi yang cukup baik kuantitas maupun kualitas dan secara kultural patut, tetapi hanya mempromosikan keamanan pangan saja. Dengan demikian, konsep kedaulatan pangan menjadi lebih penting, sebagai konsep yang menjamin adanya keamanan pangan. Industri perunggasan harus di reformasi dengan program baru, berbasis regulasi pemerintah dan hak azasi manusia tentang pangan sebagai amanat konstitusi yang dapat menjamin perkembangan sektor primer di desa. Dengan demikian setiap orang termasuk keluarga miskin di perdesaan bebas dari kelaparan dan memperoleh kecukupan protein hewani.

Kata kunci : *reformasi industri perunggasan, protein hewani, hak azasi manusia, undang-undang keamanan pangan, kedaulatan pangan*

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) mencapai 7,138 juta orang (18,93% dari total populasi) (BPS, 2007; Munawar, 2007). Target angka kemiskinan tahun 2008, adalah 15,9 persen dari total jumlah penduduk 38,2 juta (RPJMD, 2006). Target penurunan kemiskinan per tahun adalah 1,0 persen, sehingga kalau dikaitkan dengan target MDG's; penurunan 50 persen sampai sampai tahun 2015 (UNDP, 2000), hal itu sulit akan tercapai. Sementara untuk mencapai angka 1,0 persen per tahun juga sangat sulit mengingat pertumbuhan ekonomi sangat rendah (5,56%), juga karena tingginya inflasi, bencana alam (misal Lapindo), konflik sosial, penambahan penduduk, kenaikan BBM, krisis ekonomi dan keuangan dunia, dan lain-lain.

Salah satu metamorfose kemiskinan, adalah rendahnya ketahanan pangan dengan karakteristik, buruknya indikator kesehatan termasuk, kurang gizi, gizi buruk balita, atau busung lapar dan lain-lain. Hal ini terjadi karena asupan energi dan protein untuk kebutuhan pokok hidup, pertumbuhan dan perkembangan tidak terpenuhi. Akibat lanjut adalah tidak tercapainya standar fisiologis tubuh normal, rentan akan penyakit, rendahnya tingkat aktivitas dan intelegensia (WNPG, 2008)

Kondisi defisiensi gizi (protein) pada masyarakat miskin diperparah dengan terpuruknya sektor pertanian (gagal tanam, gagal panen, dan lain-lain). Akibatnya, terbatasnya produktivitas beras, jagung dan kedelai, serta by *product*-nya yang menjadi sumber pakan ternak, khususnya unggas. Sejauh ini kebutuhan akan bahan pakan ternak berkualitas masih tergantung dari impor. Dengan kondisi yang kurang menguntungkan ini muncul pertanyaan: apa solusi agar ketahanan pangan (protein hewani) untuk rumah tangga miskin, dapat dicapai ?

FENOMENA INDUSTRI PETERNAKAN

Fenomena industri peternakan unggas (broiler, layer, puyuh, itik, dan lain-lain) dan industri pendukungnya (pakan, obat, bibit, dan lain-lain) berkembang pesat, namun sebagian besar dikuasai oleh *corporate*. Kelangsungan industri peternakan termasuk para peternak di desa sebagai kontributor utama protein hewani masyarakat sangat tergantung pada impor sehingga bersifat rentan, seperti:

1. Kebutuhan jagung, kedelai, *soya bean meal* (SBM), *meat bone meal* (MBM), tepung ikan, tepung darah, tepung bulu, dan lain-lain (bahan pakan ternak).
2. Kebutuhan bibit ternak unggas sebagian masih tergantung dari impor khusus *grand-parent* (GP) *stock*.
3. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan protein hewani (non-ikan) pemerintah juga mengimpor susu, daging sapi, dan sebagainya.

Produktivitas bahan baku untuk pakan ternak di Indonesia, selain belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan industri perunggasan, juga ketersediaannya tidak stabil sepanjang tahun. Kualitasnya juga sering tidak memenuhi standar, karena agronomi dan pasca panen yang tidak tepat sehingga cemaran mikotoksinnya masih tinggi (Ali, 2007)

Peternakan berskala rumah tangga (*family farming*) di desa yang sebenarnya berpotensi dapat memenuhi kebutuhan protein hewani, belum cukup memperoleh perhatian. Banyak kendala pengembangan *family farming*, namun utamanya adalah keterbatasan lahan, sumberdaya manusia, modal, akses informasi, pasar, teknologi, serta masih kurangnya keberpihakan (kepedulian) pemerintah kepada mereka rumah tangga miskin (RTM) keluarga peternak (petani). Pola usaha dalam PIR (plasma inti rakyat), masih terbatas dan masih belum menyentuh keluarga-keluarga miskin (SIPUK, 2007)

KETAHANAN PANGAN DAN KEDAULATAN PANGAN ?

Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya mungkin terjadi bila kita berdaulat atas pangan. Kedaulatan pangan pada gilirannya, hanya mungkin terjadi bila peternak (termasuk petani). menguasai faktor-faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja dan modal, di samping faktor distribusi dan pemasaran.

Undang-undangan yang ada, yaitu UU No. 7/1996 yang menyatakan antara lain, pembangunan pangan diletakkan pada konsep ketahanan pangan (*food security*) semata, tidak dapat menjamin ketahanan pangan khusus protein hewani

karena tidak mencakup aspek kedaulatan atas pangan dan hak azasi masyarakat atas pangan, yaitu terbebas dari kelaparan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, konsep ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Namun, bagaimana pangan diproduksi dan dari mana pangan tersebut berasal, tidak diatur dalam PP tersebut (Haryono, 2008).

TINGKAT KONSUMSI PROTEIN HEWANI

Protein hewani mempunyai keunggulan dibanding protein nabati, yaitu kelebihan (lebih lengkap) asam amino esensialnya. Protein hewani mempunyai kualitas penting dalam membangun pertumbuhan dan kecerdasan manusia. Porsi konsumsi rata-rata orang Indonesia untuk pangan hewani baru mencapai 81,9 gr dari standar ideal 150 gram per hari. Data lebih spesifik untuk konsumsi daging asal unggas baru 3,5 kg per tahun dan untuk telur hanya 2,7 kg per kapita per tahun. Data ini tentu sangat memperhatikan kalau dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu : daging 36,7 kg (Malaysia); telur 9,9 kg (Thailand) dan 6,2 kg (Filipina) per kapita per tahun (WNPG, 2008).

Data produksi komoditas peternakan Jatim, menunjukkan adanya peningkatan produksi dan konsumsi selama periode 1998 – 2008 untuk daging 29,50 persen dan 13,85 persen, serta telur (436,28% dan 234,30%) (Hanggono, 2008). Namun peningkatan tersebut tidak dinikmati oleh petani dan peternak (RTM) yang sebagian besar (63,52%) ada di perdesaan (BPS, 2008). Lalu, bagaimana masa depan mereka dan anak mereka, dan lain-lain?

POTENSI UNGGAS DI JAWA TIMUR

Potensi unggas (itik, Buras, layer, broiler dan puyuh) di Jatim sangat besar, bahkan populasi layer 30,74 persen dari populasi nasional (116.473.968 ekor) dengan produksi 379.288 ton (2008). Produksi pakan ternak komersial di Jatim juga paling tinggi di Indonesia, yaitu 2.713.070 ton pada tahun 2007 atau 34,78 persen dari produksi nasional (Dinas Peternakan Jatim, 2008). Dengan potensi tersebut dan populasi yang meningkat setiap tahunnya dan ketersediaan lahan pekarangan (rata-rata 0,5 ha per keluarga) dengan populasi 3,6 orang per keluarga (Bappepro Jatim, 2006), maka usaha unggas skala kecil (*family farming*) dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani sekaligus meningkatkan *income* keluarga.

SASARAN PROGRAM

Krisis pangan khususnya defisiensi protein hewani, adalah fenomena masyarakat miskin, sehingga sasaran program, adalah :

1. Keluarga (rumah tangga) miskin atau keluarga rentan ambang batas menjadi miskin, terutama di daerah perdesaan (60% dari total orang miskin di kota dan desa) yang dikelompokkan sebagai "*The most vulnerable society*"
2. Masyarakat di desa tertinggal, desa terpencil, terutama kelompok masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian untuk penghidupan
3. Masyarakat miskin di pinggiran kota dan masyarakat kumuh
4. Koperasi desa yang bergerak di bidang perunggasan dan lembaga yang mengadakan bahan pakan ternak
5. Sebagai catatan kabupaten paling padat penduduk miskin di Jawa Timur antara lain : Bondowoso (45%) Sampang (43,22%), Situbondo (33,75%) Ponorogo (33,06%), Pacitan (33,05%), Probolinggo (30,73%) dan Bojonegoro (30,62%) (Kompas, 2001)

SOLUSI : REFORMASI INDUSTRI PETERNAKAN

Permasalahan di atas membutuhkan kepedulian semua pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Sebagai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) diajukan beberapa alternatif solusi dalam kerangka reformasi industri perunggasan, sebagai berikut :

A. Perundang-undangan (Jangka pendek)

1. Reformasi perundang-undangan tentang pangan (UU no.7, tahun 1996) sehingga mencakup aspek ketersediaan, stabilitas suplai, keterjangkauan, aspek konsumsi (*utility*)
2. Pengaturan pengelolaan lahan pertanian sebagai sumber bahan baku pakan ternak, melalui UU Lahan Pertanian Abadi
3. Pengaturan pengadaan, pengembangan, pengawasan dan distribusi (perdagangan), dan lain-lain, bahan baku pakan ternak dan bibit ternak unggas, melalui PP.
4. Mengembangkan kerja sama terpadu (*integrated*) dengan instansi (lembaga) terkait (*stakeholder*), melalui suatu *agreement* melibatkan Dinas, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota dan Perguruan Tinggi (PT) setempat. Melibatkan mahasiswa dalam pendampingan kepada peternak untuk proses inovasi dan transfer iptek.

5. Dukungan politik (kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat) :
 - 5.1. Kebijakan impor (bea masuk dan perizinan) bahan baku pakan ternak, bibit ternak, obat-obatan, *feed additive*, untuk membangun ketahanan pangan
 - 5.2. Menyeimbangkan peran *corporates (feed mill*, pembibitan, obat-obatan, dan lain-lain) dengan usaha peternakan rakyat skala kecil, *family farming*)
 - 5.3. Kedaulatan pangan bagi masyarakat miskin, meliputi :(a) hak akses terhadap pangan (bibit hijauan, bahan pakan ternak, bibit ternak), (b) akses terhadap sumber daya (air, tanah, permodalan, teknologi, dan lain-lain), (c) akses informasi dan pasar, minimal pasar domestik, (d) akses terhadap permodalan (kredit perbankan) dengan bunga rendah dan tanpa jaminan. (e) perlindungan terhadap kemungkinan adanya risiko bencana alam, penyakit ternak dan tanaman, dan lain-lain.

B. Program Action (Jangka Menengah & Panjang)

1. Aplikasi HAM yaitu hak terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi masyarakat miskin. Deklarasi Universal untuk HAM tahun 1948 pasal 25 ayat 1.
2. Pengembangan pusat pembibitan ternak unggas (ras dan aneka spesies buras) untuk memperoleh spesies (strain) unggul dan mampu beradaptasi dengan kondisi tropis.
3. Membangun lahan pertanian abadi sebagai sumber aneka pangan dan bahan baku pakan ternak di daerah-daerah rawan pangan
4. Membantu pengembangan *off – farm* (infrastruktur untuk pengeringan dan prosesing biji-bijian pakan ternak), agar terjadi keseimbangan pengembangan dengan aktivitas *on - farm*
5. Mencegah berlanjutnya konversi lahan pertanian, khususnya yang memenuhi syarat untuk cultivar (*crop*) penghasil bahan baku pakan ternak
6. Identifikasi lahan pertanian, untuk model tanaman pangan tertentu yang *adaptable* dengan lingkungan (barley, sorgum, millet, potato, dan lain-lain).
7. Memberikan insentif bagi petani dan peternak rakyat yang mengembangkan usaha peternakan dan menggunakan sumber daya lokal, melalui usaha koperasi (pakan ternak, pembibitan, dan lain-lain) di perdesaan.
8. Pengembangan pola usaha kecil, melalui program kemitraan terpadu (PKT), *Anti Poverty Programme (APP)*, Gardu Taskin, dan lain-lain

melibatkan petani-peternak keluarga miskin, usaha besar (ribuan ekor unggas) dan perbankan (skim kredit KUK, KUR, dan lain-lain) dan pola pendampingan (bimbingan) oleh perguruan tinggi (mahasiswa KKN dan dosen).

PENUTUP

Dengan reformasi industri peternakan, arah pembangunan peternakan akan lebih beorientasi kepada pembangunan ketahanan pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat miskin. Reformasi industri peternakan, khususnya perunggasan, menuju *family farming* juga bermakna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sekaligus meningkatkan *Human Index Development* yang masih terbelakang serta pencapaian *MDG's goals* pada tahun 2015, khususnya dalam kasus Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2007. Cemaran Mikotoksin pada pakan lokal. *Poultry Indonesia* (Juli 2007).
- Bapeprop Jatim. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2006-2008). Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- BPS. 2007. Survei sosial-ekonomi nasional : Jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik Jawa Timur,
- BPS. 2008. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2008., Berita Resmi Statistik No. 37/07/Tahun XI, 1 Juli 2008.
- Dinas Peternakan Jawa Timur. 2008. Laporan tahunan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2003 - 2007
- Dirjen Peternakan. 2008.. Materi sambutan pada acara Penanda Tanganan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi(P2SDS) 2010 dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur
- Hanggono, S. 2008. Sosialisasi solusi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur. Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Haryono, T. 2008. Dari ketahanan pangan menuju ke kedaulatan pangan. Lumbung pangan www.lumbungpangan.org.
- Kompas. 2001. Rubrik : Miskin 7,26 juta penduduk Jatim. Kompas, 13 Desember 2001
- Munawar, R. 2007. Mengevaluasi Program Mengatasi Kemiskinan Jawa Timur : survei sosial-ekonomi nasional Badan Pusat Statistik., Kompas (7Agustus 2007)

- WNPG. 2008. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi Untuk Mencapai Millenium Development Goal's. Sekretariat Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) IX, Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta (26-27 Agustus 2008).
- SIPUK. 2007. Sistem informasi pola pembiayaan : Budidaya ayam ras petelur (aspek produksi). Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) Bank Central Republik Indonesia.
- UNDP. 2000. The United Nation Millennium Campaign : MDG's goals End poverty 2015. United Nation Development Program.